

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money Pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2021

Joanico Francisco Ximenes Alexandre ¹, Muhammad Taufik ², Hidayat ³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

joanicoalexandre31@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan *Value for Money* pada Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015-2021 yaitu lihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif (Descriptive Qualitative Analysis Method). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015-2022. Data diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah Kota Surabaya melalui website Pemerintah daerah Kota Surabaya. Pengukuran nilai ekonomi berdasarkan perbandingan anggaran dengan realisasi anggaran. Pengukuran nilai efisiensi berdasarkan perbandingan *output* dengan *input*, dimana *output* di peroleh dari capaian kinerja dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Sedangkan *input* nilai ekonomi yang telah diperoleh dan untuk pengukuran nilai efektivitas berdasarkan perbandingan *outcome* dengan *output*, dimana *outcome* adalah target yang ingin dicapai, sedangkan *output* adalah capaian kinerja dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Pemerintah daerah Kota Surabaya terlihat bahwa performa Pemerintah kota Surabaya cukup ekonomis pada tahun 2015-2021. Tingkat ekonomis cukup stabil dalam rentang waktu tujuh tahun dan memiliki rata-rata pencapaian senilai 87.74%. Ditinjau dari aspek efisiensi, menunjukkan bahwa performa keuangan Pemerintah kota Surabaya tahun 2015 hingga tahun 2021 secara rata-rata selama tujuh tahun masuk dalam kriteria efisien. Ditinjau dari segi efektivitas, performa keuangan Pemerintah kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015-2021 menunjukkan kondisi yang tidak stabil, sehingga dari tingkat efektivitas Pemerintah Kota Surabaya harus kembali berusaha meningkatkannya.

Kata Kunci: Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, *Value for Money*, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the Financial Performance of Local Governments based on Value for Money at the Surabaya City Government in 2015-2021, namely in terms of economy, efficiency and effectiveness. The method of analysis in this research is Descriptive Qualitative Analysis Method. The data collection technique used is the report on the realization of the regional budget for revenues and expenditures (APBD) of the Surabaya City Government in 2015-2022. The data was obtained from the Surabaya City Regional Revenue and Financial Management Office through the Surabaya City Regional Government website. Measurement of economic value is based on the comparison of the budget with the realization of the budget. The measurement of efficiency value is based on the comparison of output with input, where the output is obtained from the performance achievement of the Surabaya City Government. While the input of economic value that has been obtained and for measuring the value of effectiveness is based on the comparison of outcomes with outputs, where the outcome is the target to be achieved, while the output is the performance achievement of the Surabaya City Government. The results of this study indicate that the financial performance of the Surabaya City Government shows that the performance of the Surabaya City Government is quite economical in 2015-2021. The economic level is quite stable in a span of seven years and has an average achievement of 87.74%. In terms of efficiency, it shows that the financial performance of the Surabaya City Government from 2015 to 2021 on average for seven years is included in the efficient criteria. In terms of effectiveness, the Surabaya City Government's financial performance for the 2015-2021 fiscal year shows an unstable condition, so that from the level of effectiveness, the Surabaya City Government must try to improve it again.

Keywords: Economy, Efficiency, Effectiveness, Value for Money, Financial Performance

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, DPRD diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Aktivitas

yang diselesaikan merupakan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditentukan oleh undang-undang tidak resmi. Pemberian kemerdekaan provinsi kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicurahkan sebagai kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pembangunan perekonomian suatu daerah.

Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kemampuan serta kecukupan dalam menjalankan pemerintahannya. Sudut pandang yang harus ditinjau dalam memperluas produktivitas dan kelangsungan hidup mencakup: hubungan antar penciptaan otoritas dan pemerintah daerah, potensi dan keragaman wilayah, peluang dan tantangan persaingan global. Pemerintah pusat memberikan kedaulatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Alasan otonomi daerah ialah untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat daerah. Dalam mewujudkan ketenteraman masyarakat daerah dilakukan dengan cara: mengembangkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, membentuk sarana dan prasarana di daerah yang memadai.

Peraturan Nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah menjadi capaian awal Otonomi Daerah. Kemandirian wilayah adalah hak, wewenang, dan komitmen suatu daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 dapat dipahami bahwa kemerdekaan daerah menggunakan prinsip standar kemerdekaan dalam arti daerah diberikan wewenangan untuk mengawasi dan mengarahkan semua urusan pemerintahan di luar delegasi pemerintah pusat. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk pada pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota diurus dan diatur sepenuhnya pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang layak dalam mengelola yang di desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel, yang salah satunya dapat diestimasi dengan *Value for Money*.

Value for Money bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik, menunjukkan bahwa pelayanan yang dibeli sesuai dengan tujuannya, dapat meningkatkan mutu pelayanan publik, mengurangi biaya pelayanan publik sehingga pemborosan hilang dan terjadi penghematan dalam penggunaan *input*, distribusi belanja yang lebih focus pada

kepentingan publik, dan meningkatnya kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai landasan pelaksanaan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran menggunakan *value for money*.

Mardiasmo (2018) *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah yang mendasarkan pada tiga komponen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Ekonomi merupakan praktik pembelian barang dan jasa *input* dengan tingkat nilai tertentu dengan biaya paling ideal yang dimungkinkan (*spending less*). Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan pengujian antara hasil yang disampaikan terhadap informasi yang digunakan (*cost of output*). Produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan aset yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Mardiasmo (2018) Hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu organisasi (misalnya: staf, kompensasi, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan merupakan indikator efisiensi. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dan tujuan atau target yang ingin dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan hasil yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Tingkat pencapaian program pada organisasi pemerintah dapat dilihat melalui kinerja keuangannya.

Adilson Santosa & Jantje J. Tinangon (2015) Kinerja merupakan gambaran mengenai suatu tingkat untuk mencapai kegiatan, program, strategi tertentu dengan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang ada dalam strategi perencanaan organisasi tersebut. Kinerja keuangan organisasi sektor publik dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah jenis tanggung jawab untuk mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya pemerintah, peningkatan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagai salah satu organisasi pemerintah, secara konsisten memiliki program/kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan efektifitas kerjanya.

Mardiasmo (2018) Efektifitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dinyatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Proses kegiatan operasional dapat dinyatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan aset yang paling rendah.

Adapun hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa, Putri Riskitta Amalia (2015), Rata-rata kinerja keuangan pemerintah Kota Ternate memenuhi kriteria “Ekonomis” dilihat dari sisi ekonomisnya, kriteria “efektif” apabila diamati dari sisi efektivitasnya, dan kriteria “sangat efisien” bila dilihat dari sisi efisiennya.

Selain itu, Ali Sartono (2018), kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 cukup ekonomis. Pemerintah Daerah Kota Magelang sangat produktif dalam mengontrol pengeluaran yang dikeluarkan.

Tri Astuti Afiati (2021), Hasil perhitungan menunjukkan 2 (dua) dari 3 (tiga) rasio menunjukkan hasil yang baik. Kedua rasio tersebut adalah rasio efisiensi dan rasio efektivitas, sedangkan rasio yang menunjukkan hasil kurang baik adalah rasio ekonomi. Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun 2015-2021 menggunakan pendekatan *Value for Money*?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik adalah suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pengertian diatas, akuntansi sektor publik merupakan alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.

2. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah untuk jangka waktu tertentu. Dari pemahaman diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan pemerintah ini kemudian menjadi bahan informasi bagi para pemakai dan penggunaanya dalam pengambilan suatu keputusan.

3. Pengertian Value for Money

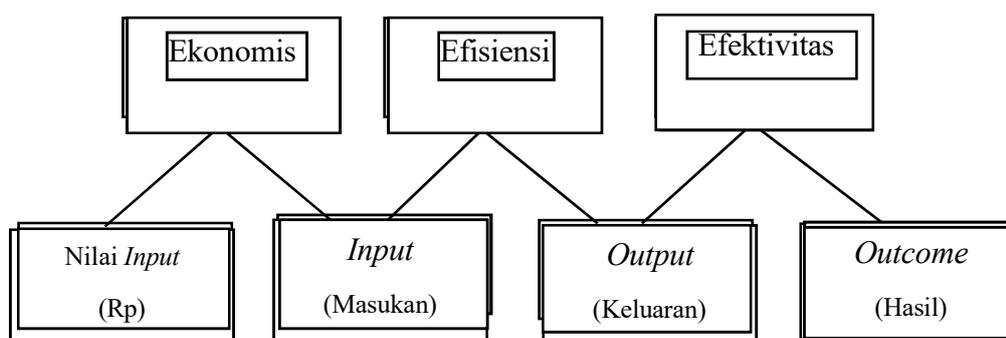
Value for Money menurut Mardiasmo (2018) adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan pada 3 komponen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas:

- 1) Ekonomis merupakan perolehan *input* dengan kualitas dan jumlah dengan harga terendah. Ekonomi berkaitan dengan perubahan *input* primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Ekonomi berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat membatasi *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang tidak efisien dan tidak efektif.
- 2) Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimal pada *input* tertentu dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan, maka efisiensi perbandingan *output/input*. *Output* sebagai barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk memberikan hasil *output* tersebut.
- 3) Efektivitas merupakan derajat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berpusat pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil.

Mardiasmo (2018), Ketiga hal tersebut merupakan komponen utama *Value for Money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa ketiga komponen tersebut belum cukup. Penting untuk menambahkan komponen lain seperti keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*Equality*).

1. Gambaran Skematis

Secara skematis, *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut:



(Sumber: Buku Mardiasmo "Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru" Tahun 2018)

1) Definisi *Input*

Input adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan aktivitas. *Input* juga dapat dikomunikasikan dalam istilah nilai uang, misalnya biaya dokter, biaya tanah, kompensasi pendidikan, dan lain-lain. *Input* adalah berbagai jenis sumber daya masukkan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk memberikan hasil *output*. *Input* tersebut dapat berupa bahan mentah untuk proses, individu (tenaga kerja, keahlian, dan ketrampilan), infrastruktur (gedung dan peralatan), dan teknologi (*hardware* dan *software*). *Input* dipisahkan menjadi dua, yaitu *input* primer dan *input* sekunder.

Mahmudi (2015) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik, *Input* primer adalah kas, sedangkan *input* sekunder adalah bahan baku, orang, infrastruktur, dan informasi lain yang digunakan untuk proses menghasilkan *output*. *Input* primer harus dirubah menjadi *input* sekunder, misalnya, untuk melengkapi Pendidikan dan pengalaman berkembang di perguruan tinggi, maka diperlukan *input* berupa dosen dan infrastruktur berupa ruang kuliah, papan tulis dan lain sebagainya.

2) Pengukuran *Input*

Pengukuran *input* adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam memberikan *output*. Proses tersebut dapat berupa program atau aktivitas. Estimasi *input* diselesaikan dengan membandingkan *input* sekunder dengan *input* primer. Dengan demikian, pengukuran *input* mengetahui harga per unit *input*.

Harga *input* tersebut diakui melalui akuntansi biaya, khususnya dengan sistem pembebanan biaya (*costing*). Biaya *input* tersebut dikaitkan dengan *output* tersebut dengan membebankan ke anggaran program yang penting. Indikator *input* yang digunakan indikator finansial berupa anggaran. Indikator *input* diperlukan untuk mengukur tingkat ekonomi. Akan tetapi, harus dipahami bahwa indikator *input* saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan penentuan indikator *output*. Ekonomi dalam memperoleh *input* harus selalu diikuti dengan efisiensi dalam proses.

3) Definisi *Output*

Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru (2018), *Output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Contoh *output* yang disampaikan oleh polisi ialah persyaratan peraturan pedoman terkait tegaknya hukum dan rasa aman pada masyarakat. Misalnya, Pemerintah Daerah memperluas masa depan, menurunkan angka kematian bayi, dan lain sebagainya.

4) Pengukuran *Output*

Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015), Estimasi *output* merupakan pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil dari implementasi program atau aktivitas.

Secara umum, pengukuran *output* dapat berbentuk kuantitatif dan keuangan, atau kuantitatif dan non-keuangan. Gambaran *Output* yang kuantitatif keuangan merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil diperoleh oleh bagian pendapatan, sedangkan *output* kuantitatif non-keuangan merupakan jumlah lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi pada periode tertentu dan sebagainya.

5) Definisi *Outcome*

Mardiasmo (2018), *Outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang hendak dicapai. *Outcome* mengukur apa yang telah dicapai. Selanjutnya, *outcome* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Mahmudi dalam bukunya Manajemen Sektor Publik (2015), Hasil yang diharapkan adalah target kinerja yang diinginkan, sedangkan *outcome* adalah hasil yang dicapai. Misalnya di suatu daerah A terjadi wabah penyakit demam berdarah (DB). Untuk mencegah penyebaran wabah tersebut di daerah B, maka dilakukan program vaksinasi di daerah B. Dengan demikian daerah B tidak terkena wabah DB. Hasil ini disebut dengan *outcome*, *output*-nya adalah banyaknya orang yang diberi vaksinasi, sedangkan *input*-nya adalah dokter, staff klinis, obat vaksinasi dan peralatan medis.

6) Pengukuran *Outcome*

Mahmudi (2015) berpendapat, Tujuan untuk pengukuran *outcome* merupakan pengukuran nilai dari suatu aktivitas atau program. Jika pengukuran *output* lebih bersifat mengukur kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas, maka pengukuran *outcome* mengukur nilai kualitas dari *output* tersebut. Kualitas *output* artinya dampak terhadap masyarakat.

Pengukuran *outcome* tidak dapat dilakukan sebelum hasil yang diharapkan dari suatu program atau aktivitas ditetapkan, karena pengukuran *outcome* berupa perbandingan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Pengukuran *outcome* juga tidak dapat dilakukan sebelum program selesai dilakukan, atau program tersebut telah mencapai tahap tertentu. Akibatnya, untuk dapat mengukur *outcome* dengan baik biasanya membutuhkan waktu yang panjang.

4. Pengertian Kinerja Keuangan

Mengingat PP No. 58 Tahun 2005, kinerja adalah hasil/keluaran dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja adalah penggambaran mengenai derajat ketercapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi yang terdapat pada *strategic planning* suatu organisasi. Tingkat pencapaian pelaksanaan pada program dalam organisasi memerlukan adanya sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah system kerja yang bertujuan agar membantu manajer publik menilai alat ukur finansial dan non-finansial. Kinerja keuangan sebagai tolak ukur yang dapat mengukur kemajuan suatu organisasi dalam memperoleh pendapatan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

5. Pengertian Indikator Kinerja

Mardiasmo (2018), Indikator kinerja berguna sebagai tanda pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan faktor-faktor keberhasilan untuk organisasi (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*). Faktor keberhasilan yang mendasarkan adalah wilayah yang menunjukkan keefektifan kinerja unit kerja organisasi. Wilayah yang mencerminkan preferensi manajerial dengan berfokus pada variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. *Critical success factor* tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Indikator kinerja kunci adalah sekumpulan indikator yang dianggap sebagai langkah-langkah kinerja kunci, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melakukan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mengidentifikasi dan memonitor pencapaian kinerja.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Meleong adalah suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sedangkan pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang berpusat pada masalah yang terjadi saat penelitian berlangsung. Data yang telah dikumpulkan, akan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau lisan dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari analisis dengan metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan atau situasi pada objek penelitian yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambar Umum Objek Penelitian

i. Kondisi Geografis singkat kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Wilayah Kota Surabaya di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Luas wilayah Kota Surabaya 274,06 Km² yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 163 desa/kelurahan.

Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang ditemukan lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, dan PT PAL. Kawasan industri di Surabaya diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Margomulyo. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang mencakup juga hotel dan restoran, merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi Surabaya yang tergabung dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

ii. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Surabaya

a. Visi

Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”

b. Misi

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota;

5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendisendi kehidupan masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional;
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu & efisien.

c. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
2. Memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak.
3. Memberikan ketentraman dan ketertiban.
4. Memperbaiki kualitas kebersihan kota.
5. Mengembangkan energi alternatif agar tetap ramah lingkungan.
6. Mengajak masyarakat agar gemar membaca dan mempertahankan budaya lokal.
7. Mendukung arus perdagangan dan jasa.
8. Meningkatkan pelayanan publik dan kemandirian daerah.
9. Mendukung sektor pariwisata agar dapat bersaing secara global.
10. Meningkatkan pelayanan transportasi umum.

d. Sasaran

1. Membangun akses pelayanan publik untuk kegiatan pendidikan formal dan nonformal.
2. Melayani dengan baik dan memenuhi kebutuhan rehabilitasi masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial.
3. Melakukan pengawasan serta pengendalian dalam melaksanakan peraturan daerah.
4. Memperbaiki manajemen pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
5. Meningkatkan sistem layanan yang berbasis teknologi ramah lingkungan.
6. Melindungi dan meberdayakan budaya lokal.
7. Memperluas jaringan bisnis dan perdagangan.
8. Memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
9. Meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian, kelautan, UMKM dan koperasi.

10. Memperbaiki jaringan jalan fasilitas transportasi.

b. Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

i. Laporan Anggaran Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2021

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya periode tahun 2015-2021. Data laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya periode tahun 2015-2021 sebagai berikut:

Tabel 1
Pemerintah Kota Surabaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2021 (Dalam Milyaran)

	Anggaran						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	6.642	6.720	7.904	8.079	8.733	8.251	8.675
Pendapatan asli daerah	3.782	3.944	4.709	4.758	5.234	5.035	5.322
Pendapatan Transfer	2.834	2.770	3.145	3.091	3.219	2.784	2.986
Lain-lain Pendapatan	24	5	50	228	278	432	365
Belanja	7.928	8.115	8.963	9.268	9.933	9.044	8.981
Belanja Operasi	5.428	5.960	6.101	6.529	6.965	7.142	7.550
Belanja Modal	2.486	2.144	2.844	2.720	2.952	1.886	1.393
Belanja Tak Terduga	10	10	10	10	13	15	34
Transfer	3	0.6	7	9	2	0.7	3
Surplus (Defisit)	1.286	1.394	1.059	1.189	1.200	792	306
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Daerah	1.311	1.414	1.069	1.189	1.200	802	316
Pengeluaran Daerah	25	20	10	-	-	10	10
Pembiayaan Netto	1.286	1.394	1.069	1.189	1.200	792	306
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Surabaya.go.id

ii. Laporan Realisasi Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2021

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya periode tahun 2015-2021. Data laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya dan

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya periode tahun 2015-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.
Pemerintah Kota Surabaya Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015-2021 (Dalam Milyaran)

Realisasi							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan	6.619	6.825	8.033	8.175	8.765	7.545	8.326
Pendapatan asli daerah	4.035	4.090	5.161	4.973	5.381	4.289	4.727
Pendapatan Transfer	2.558	2.730	2.821	2.971	3.104	2.725	3.218
Lain-lain Pendapatan	24	5	50	230	278	529	380
Belanja	6.490	7.151	7.912	8.176	9.162	8.032	7.819
Belanja Operasi	4.705	5.362	5.394	5.731	6.404	6.439	6.771
Belanja Modal	1.785	1.789	2.517	2.430	2.754	1.583	1.016
Belanja Tak Terduga	-	-	-	6	1	9	28
Transfer	-	-	-	9	2	-	3.055
Surplus (Defisit)	128	325	121	1	397	487	507
Pembiayaan	1.414	1.069	1.189	1.200	802	316	824
Penerimaan Daerah	1.311	1.414	1.068	1.201	1.200	803	316
Pengeluaran Daerah	25	20	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	1.286	1.394	1.068	1.201	1.200	803	316
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	1.414	1.069	1.189	1.200	802	316	824

Sumber : Surabaya.go.id

Tabel 2. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dari tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019, dan sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali naik ditahun 2021 di Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Total pendapatan mengalami peningkatan karena pendapatan asli daerah, pendapatan transfer selalu mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

c. Analisis Value for Money Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut ini analisis *value for money* yang peneliti lakukan menggunakan tiga (3) pengukuran:

1. Ekonomi

Menurut Mahmudi (2015) Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupaiah untuk memperoleh input tersebut. Berikut ini formula untuk pengukur tingkat ekonomi:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

Ketentuan menurut Mahsun (2017), Ketentuan Ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika diperoleh perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, tidak ekonomi.
- 2) Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, ekonomi.
- 3) Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, ekonomi berimbang.

Analisis pengukuran ekonomis pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota Surabaya, tahun 2015 sampai 2021 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.
Perhitungan Ekonomi**

No	Tahun	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran	Rasio Ekonomis	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3/4*100%	
1	2015	7.928.337.395.393	6.490359.759.532	81,86%	Ekonomi
2	2016	8.115.231.350.395	7.151.661.549.430	88,13%	Ekonomi
3	2017	8.963.930.686.060	7.912.409.152.257	88,27%	Ekonomi
4	2018	9.268.450.333.673	8.176.929.496.298	88,22%	Ekonomi
5	2019	9.933.509.442.785	9.162.655.939.831	92,64%	Ekonomi
6	2020	9.044.328.840.921	8.032.680.988.065	88,81%	Ekonomi
7	2021	8.981.620.825.377	7.819.077.321.545	87,06%	Ekonomi

(Sumber: Data Diolah 2022)

Berdasarkan table 3. Perhitungan Ekonomi, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Periode 2015-2021 sudah ekonomis, disebabkan hasil perhitungannya kurang dari 100% yang dikategorikan sebagai ekonomis.

2. Efisiensi

Mardiasmo (2018), Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Apabila semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat

efisiensi suatu organisasi. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per *input*. Berikut ini formula untuk pengukuran efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Ketentuan Menurut Mahsun (2017), Ketentuan Efisiensi adalah sebagai berikut:

- 1) Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, efisien.
- 2) Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efisien berimbang.
- 3) Jika diperoleh perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, tidak efisien.

Tabel 4.
Perhitungan Efisiensi

s	Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5 =3/4*100%	
1	2015	7.928.337.395.393	6.619.031.160.936	83,48%	Efisien
2	2016	8.115.231.350.395	6.825.754.275.891	84,10%	Efisien
3	2017	8.963.930.686.060	8.033.573.163.669	89,62%	Efisien
4	2018	9.268.450.333.673	8.175.219.120.669	88,20%	Efisien
5	2019	9.933.509.442.785	8.765.153.020.782	88,24%	Efisien
6	2020	9.044.328.840.921	7.545.416.994.175	83,42%	Efisien
7	2021	8.981.620.825.377	8.326.878.076.226	92,70%	Efisien

(Sumber: Data Diolah 2022)

Berdasarkan tabel 4. Perhitungan Efisiensi, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya efisien, disebabkan hasil perhitungan kurang dari 100% yang dikategorikan sebagai efisien.

3. Efektivitas

Efisiensi Menurut Mardiasmo (2018), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya menilai apakah suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini formula pengukuran efektivitas:

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} \times 100\%$$

Ketentuan Menurut Mahsun (2017), Ketentuan Efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efektif berimbang.
- 3) Jika diperoleh perbandingan lebih darri 100% ($X > 100\%$) maka, efektif.

Tabel 5.
Perhitungan Efektivitas

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Keterangan
1	2	3	4	5 = $3/4 \times 100\%$	
1	2015	6.619.031.160.936	6.642.257.716.374	100,34%	Efektif
2	2016	6.825.754.275.891	6.720.301.543.490	98,46%	Tidak Efektif
3	2017	8.033.573.163.669	7.904.894.969.358	98,39%	Tidak Efektif
4	2018	8.175.219.120.669	8.079.142.194.268	98,82%	Tidak Efektif
5	2019	8.765.153.020.782	8.733.224.623.734	99,63%	Tidak Efektif
6	2020	7.545.416.994.175	8.251.513.787.281	109,35%	Efektif
7	2021	8.326.878.076.226	8.675.008.247.134	104,19%	Efektif

(Sumber: Data Diolah 2022)

Berdasarkan tabel 5 Perhitungan Efektivitas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya periode 2015-2021 dinyatakan sudah efektif pada tiga tahun (2015, 2020, 2021) dan tidak efektif pada empat tahun (2016, 2017, 2018, 2019) berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai dengan analisis data dan hasil pembahasan maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya dapat disimpulkan dari analisis aspek ekonomis terlihat bahwa performa Pemkot Surabaya cukup ekonomis pada di tahun 2015 sampai 2021 Tingkat ekonomis cukup stabil dalam rentang waktu 7 tahun dan memiliki rata- rata pencapaian senilai 87.74%. Keadaan

ini menginformasikan bahwa performa keuangan Pemkot Surabaya secara ekonomis bisa dipertahankan agar indeksnya tidak naik lagi di periode anggaran yang akan datang.

Dari aspek efisiensi, menunjukkan bahwa performa keuangan Pemkot Surabaya tahun 2015 hingga tahun 2021 secara rata-rata selama tujuh tahun masuk dalam kriteria efisien. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota Surabaya cukup efisien. Pemerintah daerah sudah mampu memenuhi target efisiensi yaitu penggunaan dana minimal untuk hasil maksimal.

Dari segi efektivitas, performa keuangan Pemkot Surabaya untuk tahun anggaran 2015-2021 menunjukkan kondisi yang tidak stabil, sehingga dari tingkat efektivitas pemerintah kota harus kembali berusaha meningkatkannya. Pemerintah daerah Kota Surabaya sudah memiliki kinerja keuangan yang efektif dan mampu merealisasikan program sesuai harapan.

Saran

Untuk Pemerintah Daerah Kota Surabaya perlu adanya pengelolaan dan pengkajian lebih mendalam terutama dalam hal kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya baik secara efektivitas sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas pada harga terendah, memperoleh keluaran yang maksimal pada masukan tertentu dengan penggunaan terendah untuk mencapai target, dan dapat memperoleh pencapaian hasil program/kegiatan pada target yang telah ditentukan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti kinerja keuangan dengan menggunakan tahun yang lebih Panjang dan menggunakan metode pengukuran selain *Value for Money*, misalnya *Balance of Score Card* yang lebih banyak supaya hasil penelitian mendekati kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Munandar, C. Susi Maryanti. Analisis Value for Money untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya 2015-2019. 2021.
- Ali Sartono. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep Value For Money. 2018.
- Dwinanda, Yosie. “*Analisis Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”. Skripsi--Universitas Sanata Dharma, 2018.
- Felia Putri Arinda. Analisis *Value for Money* pada Kinerja Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Riau. 2021.
- Fitriani. Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bulukumba. 2017.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan

- Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.
- Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa Edisi Ketiga (Tahapan, Strategi, Metode dan Tekniknya)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Muharto. *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Nur Hanifah, Hafidotul. “Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money pada pengadilan negeri Slawi 2020”.
- Nur Zeni Amilia Putri. ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA. 2020.
- Ridwan, Mukminati. “Konsep Value For Money: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, No. 1, Vol. 7, Juni, 2017.
- Roy Barton. *The Value for Money Concept in Investment Evaluation: Deconstructing its Meaning for Better Decision Making*. 2019.
- Sri Rahayu. Penerapan Konsep Value For Money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang. 2018.
- Tri Astuti Afiati. Analisis Value For Money pada kinerja di bBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sKab. Semarang. 2021.
- Zain, Wardiman. “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makasar*, 2018.
- https://www.jurnal.id/id/blog/arti-value-for-money-manfaat-cara-mengukurnya-sbc/#Pengukuran_Value_for_Money